

GELOMBANG KEDUA GERAKAN FEMINISME DI INDONESIA (1982-1998)

Astri Aristiani, Abdul Syukur, Umasih
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta
e-mail: aristianiastri@gmail.com

Abstract: *The New Order government created its own gender politics. They adopted the concept of "Motherism" and viewed women as mothers and wives. The life of the independent feminism movement in the period 1982-1998 had to experience cat-and-cat with the New Order government, so it is not uncommon for some of these organizations to be illegal. In the midst of repressive government attitudes, the independent feminism movement is challenged. But it was able to go through with a mature strategy, so that many of them were able to survive until the New Order was dethroned, even able to cooperate with the international feminism movement. Then at the time of the May 1998 riots, independent feminism movements either at the center or peripheral areas synergized with each other to voice freedom. This study aims to examine the dynamics of life of the second wave of feminism movement in Indonesia in 1982-1998. This study uses historical methods whose data is obtained from interviews, literature studies and presented descriptively-narratively.*

Keywords: *Feminism movement, New Order, Indonesia*

Abstrak: Pemerintah Orde Baru menciptakan politik gender tersendiri. Mereka mengadopsi konsep "Ibuisme" dan memandang perempuan sebagai ibu dan istri. Kehidupan gerakan feminisme independen pada periode 1982-1998 harus mengalami kucing-kucingan dengan pemerintah Orde Baru, sehingga tidak jarang dari beberapa organisasi ini bersifat ilegal. Di tengah sikap pemerintah yang represif, gerakan feminisme independen banyak mendapat tantangan. Namun hal tersebut mampu dilalui dengan strategi yang matang, sehingga banyak dari mereka yang mampu bertahan hingga Orde Baru lengser, bahkan bisa menjalin kerjasama dengan gerakan feminisme internasional. Kemudian pada saat kerusuhan Mei 1998, gerakan feminisme independen baik yang berada di pusat ataupun daerah saling bersinergi untuk menyuarakan kebebasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai dinamika kehidupan gelombang kedua gerakan feminisme di Indonesia pada tahun 1982-1998. Penelitian ini menggunakan metode historis yang datanya didapat dari hasil wawancara, kajian kepustakaan dan disajikan secara deskriptif-naratif.

Kata kunci: *Gerakan feminisme, Orde Baru, Indonesia*

PENDAHULUAN

Secara etimologis, feminisme berasal dari kata *femme* berarti perempuan (tunggal) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak), sebagai kelas sosial (Ratna, 2013, p. 184). Apabila ditinjau dari pengertian di atas,

sebenarnya feminisme bukan hanya memperjuangkan kesetaraan perempuan di hadapan lelaki saja, tetapi memperjuangkan lelaki dari dominasi, eksploitasi, dan sistem yang tidak adil.

Di Indonesia sendiri sampai saat ini masih banyak perdebatan mengenai gerakan feminisme yang dikatakan berbeda dengan gerakan perempuan. Masih banyak perempuan-perempuan Indonesia yang belum setuju jika gerakannya dilabeli dengan gerakan feminisme. Padahal kata tersebut boleh untuk digunakan dalam gerakan perempuan. Karena pemahaman feminisme secara mendasar yaitu sebagai analisis masalah perempuan dan bertindak untuk melawan diskriminasi terhadap perempuan (Arivia & Subono, 2018, p. 6).

Ketika memasuki era Orde Baru, gerakan feminisme disebut Ibuisme karena gerakan feminisme dipaksa mati dan perempuan dirumahkan. Ideologi Ibuisme disebarkan pada Hari Ibu 22 Desember menjadi *mother's day* dan Hari Kartini menjadi hari beban ganda bagi perempuan. Kata-kata “ingat kodrat” dipopulerkan pada hari raya berbasis gender tersebut (Melati, 2019, p. 36). Menurut Nunuk P. Murniati, salah satu tokoh feminisme masa Orde Baru, gerakan feminisme terbagi ke dalam dua golongan. Golongan pertama pada 1966-1980 dan golongan kedua pada 1980-1998.

Pada golongan pertama, gerakan feminisme mengalami masa suram karena Soeharto berhasil melumpuhkan Kowani dalam Kongres Luar Biasa Kowani yang diselenggarakan pada tahun 1966 sehingga federasi itu mau mendukung pemerintahannya. Kowani ditunjuk untuk menjadi organisasi naungan bagi semua organisasi perempuan masa Orde Baru. Dari organisasi profesional, sosial, keagamaan, hingga fungsional. Dengan demikian Kowani berhenti sebagai alat perjuangan independen kaum perempuan, dan memilih dirinya dicetak mengikuti budaya “ikut suami” yang merupakan salah satu ciri Orde Baru. (Suryakusuma, 2011, p. 17).

Semua gerakan feminisme diwajibkan masuk ke dalam Kowani, semua perempuan desa diwajibkan mengikuti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

PKK adalah satu-satunya saluran pemerintah di tingkat masyarakat kelas bawah baik di kota maupun desa untuk melaksanakan program-program bagi kaum perempuan. Baik di bidang sosial, politik, budaya, ideologi, dan ekonomi. Walaupun PKK memiliki kaitan dengan perempuan, sasaran terakhirnya adalah keluarga karena keluarga adalah pendukung pembentukan masyarakat dan keutuhan negara. Semua istri pegawai negeri diwajibkan mengikuti Dharma Wanita, semua istri anggota militer diwajibkan mengikuti Dharma Pertiwi (Suryakusuma, 2011, p. 27). Ditambah didirikannya Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita (UPW) pada tahun 1978 semata-mata untuk mengontrol populasi penduduk dan untuk mempertahankan ide mendasar tentang perempuan (Melati, 2019, p. 36).

Namun para aktivis feminisme Indonesia tidak tinggal diam, pemerintahan yang represif malah menjadi faktor pendorong untuk membuat organisasi perempuan di luar Kowani, semakin terasa ketika efek buruk pembangunan melanda dan dinilai merugikan perempuan. Hingga pada golongan kedua, gerakan feminisme mengalami perpecahan. Ada gerakan yang sejalan dengan pemerintahan dan ada yang melawan pemerintahan.

Yang sejalan dengan pemerintahan Soeharto adalah Kowani sedangkan yang melawan adalah ditandai dengan bermunculan yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan, atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang advokasi dan informasi mengenai masalah perempuan dan yang menjalani *kucing-kucingan* karena terbentur dengan kebijakan pemerintah yang ada. Meskipun begitu, gerakan feminisme independen tetap tumbuh di berbagai daerah dan nasional. Gerakan feminisme gelombang ini menjadikan rezim Orde Baru dan militerisme sebagai musuh bersama. Tujuan perjuangannya yaitu melawan patriarki, melawan rezim Orde Baru yang otoriter, dan memperjuangkan hak serta kesejahteraan perempuan.

Dimulai dari berdirinya Yayasan Annisa Swasti di Yogyakarta (1982) yang bertujuan untuk memperkuat hak-hak buruh perempuan dan perempuan yang bekerja di industri batik sebagai penjual di toko-toko. Diikuti dengan yang lainnya seperti

Kalyanamitra di Jakarta (1985) yang sangat peduli pada masalah-masalah yang dihadapi buruh dengan memberikan informasi mengenai hak-hak buruh, organisasi ini awalnya sudah sangat berpihak kepada buruh, nelayan, petani, dan pekerja sektor informal (DKK, 2013, p. 25). Kemunculan gerakan feminisme pada awal tahun 1980-an, menginspirasi gerakan feminisme lain dan membuat kemunculannya semakin meningkat.

Pada tahun 1997, muncul sebuah organisasi yang bernama Suara Ibu Peduli. Organisasi ini berawal dari pertemuan diskusi yang dilakukan di Kantor Yayasan Jurnal Perempuan oleh para aktivis untuk melakukan demonstrasi guna menjatuhkan rezim Soeharto. Memilih isu susu bayi dinilai karena bisa menarik publik karena masalah itu dirasakan oleh semua orang. Susu bayi erat kaitannya dengan perempuan sebagai ibu. Dan Bundaran Hotel Indonesia dipilih sebagai tempat untuk berdemonstrasi karena tempatnya yang strategis dilalui oleh para pekerja dari kelas manapun.

Pada saat bersamaan, kantor Jurnal Perempuan menjadi tempat pusat pengorganisasian nasi bungkus dan dana untuk mendukung demonstrasi gerakan mahasiswa pada Mei 1998. Dana tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti biaya transportasi, kaos bertuliskan “Reformasi Total”, dan penerbitan buletin propaganda mahasiswa “Bergerak”. Pada akhirnya Presiden Soeharto yang telah kehilangan legitimasi dan dukungan, menyatakan mundur dari jabatan pada tanggal 21 Mei 1998 (Arivia & Subono, 2018, p. 16). Reformasi yang dituntut oleh gerakan feminisme bukan hanya menggulingkan Presiden Soeharto, tetapi juga mengganti sistem yang berpihak pada perempuan.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Gelombang Kedua Gerakan Feminisme di Indonesia 1982-1998. Tema penelitian tentang gerakan feminisme di Indonesia, telah merujuk pada satu permasalahan yang ingin diketahui, yaitu dinamika kehidupan gerakan feminisme ini, khususnya strategi dan tantangan yang dihadapi serta pengaruh gerakan tersebut terhadap kelengseran Soeharto dari kursi jabatannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis yang terdiri dari 4 tahapan. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Louis Gottschalk bahwa penelitian sejarah meliputi tahap heuristik atau pengumpulan sumber, kritik, interpretasi, dan penulisan atau historiografi (Gottschalk, 2008, p. 18). Dalam melakukan pemilihan topik, dapat menggunakan pendekatan emosional dan pendekatan intelektual. Pendekatan emosional adalah ketertarikan peneliti secara pribadi atau emosional, sedangkan pendekatan intelektual adalah adanya ketertarikan peneliti atas topik yang dikuasai. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan intelektual karena peneliti tertarik terhadap isu-isu perempuan khususnya sejarah gerakan feminisme di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Munculnya Gelombang Kedua Gerakan Feminisme Indonesia (1982-1998)

Adanya Deklarasi PBB pada tahun 1976-1985 *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang memuat isu-isu penting mengenai kesetaraan gender seolah menjadi angin yang bagus untuk munculnya organisasi perempuan independen pada masa Orde Baru (Amini, 2021, p. 113). Indonesia termasuk salah satu negara yang setuju terhadap deklarasi tersebut, sehingga pada tahun 1984, pemerintah membuat UU No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW). Namun dalam prakteknya, UU ini tidak bisa dijalankan secara maksimal, sehingga lahirnya gerakan feminisme oposisi yang independen (Afifah, 2017, pp. 108–109).

Sejarah berdirinya gerakan feminisme pada periode ini berasal dari rasa kecewa beberapa aktivis 66 yang sangat berharap kepada Orde Baru agar bisa memberikan perubahan di seluruh sektor, khususnya di sektor ekonomi. Namun, harapan tersebut

tidak sejalan dengan realita. Gerakan feminisme segera menyatakan diri menjadi organisasi independen dan bekerja untuk memperkuat posisi masyarakat sipil. Setelah banyaknya masalah yang dihadapi kaum perempuan, semakin banyak gerakan feminisme independen perempuan yang memfokuskan kegiatannya untuk membantu kaum perempuan memperoleh hak-hak hidupnya (Rahayu, 1996, p. 439).

Pemerintah Orde Baru melarang adanya kegiatan politik di perguruan tinggi dengan diterapkannya Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Karena adanya pembatasan itu, membuat mahasiswa yang memilih untuk membentuk organisasi kecil di luar kampus yang seolah-olah tidak memiliki tujuan politis. Saat itulah LSM banyak muncul pada tahun 1980-an. LSM ini turut berkecimpung dalam pengembangan organisasi perempuan. Mayoritas pemimpin organisasi perempuan adalah lulusan universitas karena mereka berasal dari komunitas LSM perempuan dan kelompok studi. Para aktivis mahasiswa ini adalah bagian dari meledaknya pendidikan tinggi, terutama dampak dari adanya perkembangan perguruan tinggi di pusat daerah sejak tahun 1970-an (Muchtar, 2016, pp. 68 & 83).

Negara memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan citra perempuan yang ideal. Itulah mengapa gerakan perempuan tidak pernah mengalami ketertindasan seperti yang dialami pada masa Orde Baru. Maka dari itu, para akademisi feminis independen terdorong untuk menciptakan LSM independen perempuan yang menjadi subur ketika masa Orde Baru khususnya pada periode 1982-1998 (Arivia, 2006, p. 17).

Perkembangan Gerakan Feminisme Periode 1982-1998

Selama periode 1982-1998, ada 71 kelompok dan koalisi gerakan feminisme yang otonom dan independen terbentuk di Indonesia. Diantaranya di pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Timor Timur, dan Irian Jaya—sekarang Timor Leste dan Papua. Sebanyak dua puluh satu organisasi berdiri pada tahun 1980-an, sedangkan lima puluh lima lainnya berdiri sekitar tahun 1990-an. Faktor yang membedakan gerakan feminisme dari periode 1980-an dan 1990-an

adalah adanya pergeseran dalam wacana perempuan dalam politik gender dan di kalangan lawan, adanya peningkatan kesadaran perempuan, serta proses demokratisasi yang dinilai lebih cepat (Muchtar, 2016, p. 65).

Saya membagi perkembangan ke dalam dua dekade. Dan dari setiap dekade ini, saya akan membandingkan organisasi perempuan dependen dan independen. Organisasi perempuan dependen umumnya dipengaruhi oleh politik gender Orde Baru dan menempatkan perempuan sesuai kodratnya yaitu sebagai ibu dan istri. Sementara organisasi perempuan independen adalah untuk melawan politik gender Orde Baru yang mencoba untuk melemahkan pengaruh dari kekuasaan Negara dan dalam beberapa hal sudah dipengaruhi oleh wacana feminisme. Organisasi ini juga bersifat politis.

Organisasi perempuan dependen pada periode 1980-an memfokuskan perjuangannya pada perbaikan kondisi perempuan, daripada kebutuhan politiknya. Mereka berprinsip bahwa apa yang mereka lakukan adalah murni sebagai bantuan bagi kaum perempuan yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pada tingkat komunitas. Dalam dekade ini, ada 11 organisasi perempuan yang pro terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru yang merupakan LSM dengan bentuk yayasan yang mendapat suntikan dana dari lembaga dana internasional. Dalam praktek kerjanya, mereka menggunakan pendekatan WID sehingga tidak mempertanyakan sistem ekonomi-politik dan hubungan kuasa yang bermuatan gender. Sebaliknya organisasi ini adalah menjadi kelompok program-program yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru (Muchtar, 2016, p. 70).

Sementara itu, pada periode 1980-an ini, Organisasi perempuan independent ditandai dengan munculnya gerakan mahasiswa dan pertumbuhan LSM transformatif, mendorong lahirnya empat organisasi perempuan dan enam organisasi perempuan radikal pada akhir tahun 1980-an. Pasca tahun 1988, gerakan lawan oposisi pemerintah menjadi lebih aktif. Terbukti dari meningkatnya kegiatan politik seperti demonstrasi mahasiswa yang muncul pasca tahun 1983. Kelompok mahasiswa ini

adalah pendorong lahirnya organisasi perempuan mulai dari pertengahan hingga akhir tahun 1980-an (Mughtar, 2016, p. 71).

Karena adanya upaya pembatasan kegiatan di kampus melalui program NKK/BKK membuat banyak siswa mendirikan LSM dan kelompok studi bagi kegiatan sosial dan politik. Kelompok studi atau kelompok diskusi ini dibentuk sekitar tahun 1982-1983 di kampus-kampus yang tesebar di Pulau Jawa. Pada tahun 1986-1987, kelompok studi ini sudah semakin menyebar. Kelompok studi ini mendorong lahirnya organisasi perempuan di Jakarta dan Yogyakarta pada akhir tahun 1980-an (Mughtar, 2016, pp. 71 & 72).

Organisasi perempuan dependen pada periode 1990-an. Pada periode ini mulai terasa pengaruh pendekatan GAD yang muncul di Indonesia sejak pertengahan 1990-an. Pengaruh GAD terlihat dari adanya peningkatan dalam pelatihan gender di seluruh Indonesia dan mulai adanya pengenalan istilah gender dalam kosa kata Kementerian Urusan Perempuan. GAD banyak membuka mata para feminis akan masalah kekuasaan yang timpang dalam struktur ekonomi dan politik di Indonesia sehingga kesadaran feminis menjadi mengalami peningkatan. Adanya pendekatan GAD dan jaringan antar organisasi membuat organisasi perempuan dependen mengalami perubahan perspektif terhadap masalah perempuan, pergeseran kepentingan gender, perubahan sikap terhadap Negara, dan keterlibatan dalam demokratisasi (Mughtar, 2016, pp. 77–78).

Organisasi perempuan independen pada periode ini mulai menunjukkan dominasi gerakannya dikarenakan sudah banyak dipengaruhi oleh wacana feminis, diperkuat dengan adanya percepatan proses demokratisasi, serta intensifikasi masalah yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan politik. Berkembangnya gerakan feminisme pada periode ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja, tetapi juga di Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, dan Irian Jaya. Gerakan feminisme periode 1990-an dipengaruhi oleh feminisme Marxis, feminisme umum, feminisme agama, dan feminisme Dunia Ketiga (Mughtar, 2016, pp. 78 & 104).

Pada periode ini, feminisme Muslim banyak muncul di daerah Jakarta dan Yogyakarta mencoba mengangkat isu mengenai perempuan Muslim ke dalam wacana-wacana masalah perempuan Indonesia. Hadirnya feminisme agama dengan feminisme kultural tentu memiliki perbedaan masing-masing. Perbedaan ini dilatarbelakangi karena tiap-tiap organisasi memiliki struktur dan strategi yang berbeda. Namun hal ini tidak dijadikan sebagai sebuah penghalang, organisasi feminisme basis apapun bisa diajak bekerja sama karena isu perempuan adalah isu bersama.

Gerakan feminisme Indonesia juga turut aktif dalam kancah internasional. Mereka pun aktif menjalin kerja-kerja advokasi dengan beberapa organisasi feminisme luar negeri. Konferensi Kairo (1994) yang membahas mengenai hak reproduksi perempuan. Aktivis perempuan yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut merasa terinspirasi untuk mengkampanyekan hak reproduksi perempuan di dalam komunitas Islam. Lalu ia melaksanakan kampanye hak reproduksi perempuan di kalangan pesantren yang ada di berbagai wilayah Indonesia, serta membangun jaringan dengan organisasi perempuan yang ada di Nahdlatul Ulama (NU). Kampanye ini menuai kesuksesan karena NU mulai memperhatikan isu kesehatan reproduksi perempuan (Muchtar, 2016, p. 109).

Pada Konferensi Nairobi (1985), gerakan feminisme Indonesia termotivasi untuk membuat kelompok studi perempuan di perguruan tinggi dengan alasan permasalahan perempuan tidak boleh dipisahkan dari kegiatan ilmiah (Noerhadi, 1985, pp. 381 & 396).

Menjelang berakhirnya Orde Baru, banyak terjadi kasus pelanggaran HAM. Banyak organisasi feminisme yang secara langsung maupun tidak langsung turut melakukan gerakan anti politik Orde Baru. Salah satunya adalah Suara Ibu Peduli (SIP) yang merupakan gabungan dari beberapa anggota Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), Solidaritas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) yang memutuskan untuk melakukan demonstrasi. Hal yang dinilai sangat efektif untuk melawan rezim Orde Baru adalah

dengan menggunakan simbol “ibu” agar bisa mendapatkan simpati rakyat. Maka digunakanlah “politik susu” untuk mewujudkan kamufase “ibu-ibu”. Hal ini didukung dengan YJP yang membagikan susu di kantornya agar terlihat bahwa YJP sangat prihatin dengan nasib para ibu di tengah krisis ekonomi yang tidak mampu untuk membeli susu (Arivia & Subono, 2018, p. 15).

Pada tanggal 23 Februari 1998, SIP melakukan demonstrasi dengan memilih Bundaran Hotel Indonesia sebagai lokasinya. Bundaran Hotel Indonesia dipilih sebagai tempat untuk berdemonstrasi karena tempatnya yang strategis dilalui oleh para pekerja dari kelas manapun. Hingga pada akhirnya ketiga demonstran yang bernama Gadis Arivia (YJP), Karlina Leksono (YJP), Wilasih Nophiana (aktivis dari Salatiga yang berpura-pura menjadi ibu) ditangkap oleh aparat dan ditahan selama 24 jam. Persidangan baru dilaksanakan pada tanggal 4 dan 9 Maret 1998 dengan dijatuhkan vonis hukuman 3 bulan dan denda karena dianggap mengganggu ketertiban umum (Arivia & Subono, 2018, pp. 16–17).

Puncaknya pada demonstrasi Mei 1998, Kantor YJP pada saat itu menjadi tempat untuk mengkollektif sumbangan dari banyak donator dan berhasil mengumpulkan uang hingga lebih dari 1 Miliar serta nasi bungkus sebanyak 70.576. uang itu dialokasikan untuk biaya transportasi, kaos bertuliskan “Reformasi Total”, dan penerbitan buletin propaganda mahasiswa “Bergerak”. Hingga Soeharto resmi memundurkan diri dari kursi jabatannya pada 21 Mei 1998 (Arivia & Subono, 2018, p. 16).

Selain gerakan feminisme yang ada di Jakarta, gerakan feminisme daerah seperti Yogyakarta pun memiliki andil dalam proses penggulingan Soeharto dari kursi jabatannya. Yasanti melakukan penguatan terhadap komunitas perempuan secara langsung. Dengan kondisi negara yang sedang dilanda krisis moneter, Yasanti menanamkan pendidikan kritis di dalam komunitas karena Yasantilah yang langsung mengorganisir komunitas perempuan itu sendiri, komunitas tersebut adalah buruh industri di Jawa Tengah. Para buruh di daerah turut terjun langsung karena mereka dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang dialami mereka, khususnya buruh

perempuan. Seperti mendapat tekanan, mendapat upah yang rendah, itu semua adalah kebijakan nasional yang sangat merugikan buruh. Maka dari itu, mereka termotivasi untuk melakukan aksi pelengseran Soeharto (Wawancara dengan Amin Muftiyah melalui panggilan suara, pada 17 Desember 2020).

Strategi dan Tantangan yang Dihadapi Gelombang Kedua Gerakan Feminisme Indonesia (1982-1998)

Strategi yang dilakukan oleh gerakan feminisme agar tetap bertahan di tengah sikap pemerintah yang represif adalah dengan cara membuat jaringan dan koalisi. Tujuan dengan dibuatnya jaringan dan koalisi adalah untuk mengorganisir perempuan. Karena salah satu prinsip feminisme adalah kekuatan perempuan ada pada jaringan dan koalisi, jadi perempuan tidak bergerak sendiri. Adanya kecenderungan untuk membuat jaringan dan koalisi dengan mengangkat isu-isu perempuan, baik skala lokal maupun nasional. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya koalisi yang terbentuk sejak tahun 1991. Koalisi ini tidak hanya berkembang melibatkan jaringan di Pulau Jawa seperti Gerakan Antikekerasan terhadap Perempuan dan Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi, namun juga melibatkan jaringan di Indonesia bagian timur seperti Jaringan Kesehatan Reproduksi Perempuan Indonesia Timur. Ini membuktikan bahwa gerakan feminisme telah memperluas cakupannya dari sebelumnya hanya terpusat di Jakarta dan Yogyakarta, menjadi ke Sumatera, dan Indonesia bagian timur (Mughtar, 2016, p. 86).

Setiap organisasi feminisme memiliki masalah internal yang berbeda. Mereka sering kehilangan fokus karena kurangnya kesungguhan dan kemampuan untuk melakukan analisis sosial agar dapat memahami permasalahan. Namun ini semua terbantu dengan luasnya relasi mereka hingga kancah internasional sehingga mereka terbantu untuk mencetuskan isu. Maka dari itu, isu yang diperbincangkan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan isu yang sedang hangat di luar negeri, umumnya dunia Barat. Sehingga isu tersebut kurang mengakar karena bukan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia (Hafidz, 1992, pp. 96–97).

Gerakan feminisme berama-ramai mengembangkan ideologi feminis sebagai upaya untuk mengatasi tekanan dari pemerintah dan meminimalisir ketergantungan terhadap lembaga dana internasional. Namun langkah ini mengalami tantangan karena tidak adanya *platform* bersama, ditambah adanya rasa sentimen anti-Jakarta dan kurangnya pengalaman untuk membangun gerakan feminisme yang lebih kuat dan berpengaruh. Gerakan feminisme juga mengalami tantangan dalam keterlibatan mereka dengan gerakan prodemokrasi dan proses demokratisasi. Gerakan feminisme merasa terbatas untuk membawa isu-isu kekerasan seksual seperti perkosaan ke dalam arena publik (Muchtar, 2016, p. 148).

Selain tantangan di atas, unsur agama dan budaya juga menjadi tantangan gerakan feminisme Indonesia pada periode ini. Relasi manusia dengan Pencipta sudah lebih dulu ada daripada agama. Tetapi justru ajaran agama sudah banyak diwarnai dengan budaya patriarki. Agama dibuat berdasarkan perspektif maskulin, patriarkh, dan bapak. Khususnya ajaran agama abrahamik, agama yang turun dari langit seperti Islam, Yahudi, Kristen. Berbeda dengan kepercayaan seperti Kejawen, yang cenderung untuk bebas dan toleran. Apalagi agama banyak dipolitisir dan banyak munculnya kelompok anti-feminisme. Sedangkan budaya sebenarnya bisa terkikis, namun ini juga menjadi sebuah tantangan. Budaya Jawa sebagai yang menjadi tantangan, tetapi dilihat dulu budaya Jawa yang seperti apa, karena budaya Jawa itu banyak macamnya. Kalau budaya Jawa seperti pertanian, nelayan, justru perempuannya menjadi perempuan tangguh, mereka bebas mengungkapkan potensinya. Berbanding terbalik dengan budaya Jawa feodal atau priyayi (Sumber wawancara dengan Nunuk P. Murniati melalui Zoom Meeting, 15 Juli 2021).

KESIMPULAN

Setelah pada periode sebelumnya yaitu 1966-1980 gerakan feminisme Indonesia dipaksa menjadi kaki tangan pemerintah sehingga melahirkan gerakan feminisme dependen yang memiliki otonom ataupun tidak, pada periode 1982-1998 ini terdapat kebangkitan baru bagi gerakan feminisme independen yang mana dengan

diawali dengan berdirinya Yayasan Annisa Swasti di Yogyakarta 1982. Berdirinya gerakan feminisme independen tidak bisa dijauhkan dari gerakan intelektual mahasiswa dan kaum agamawan. Tidak hanya bekerja sendiri, mereka membuat jaringan dan forum antarorganisasi dengan tujuan memperkuat kerja sama untuk mengentaskan ketidakadilan terhadap manusia dan lingkungan khususnya perempuan, akibat dari adanya politik gender Orde Baru.

Mereka hadir karena menginginkan sebuah reformasi konstitusi yang adil gender. Maka pada demonstrasi Mei 1998, gerakan feminisme menjadi pelopor demonstrasi dan diikuti oleh gerakan mahasiswa. gerakan feminisme banyak memberikan sumbangsih pada demonstrasi ini, baik dari segi tenaga maupun pikiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. D. (2017). *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor.
- Amini, M. (2021). *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia (1928-1998)*. Gadjah Mada University Press.
- Arivia, G. (2006). *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Penerbit Buku Kompas.
- Arivia, G., & Subono, N. I. (2018). Seratus Tahun Feminisme di Indonesia; Analisis terhadap Para Aktor, Debat, dan Strategi. *FES Indonesia*, 1–28. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/15114.pdf>
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. UI Press.
- Hafidz, W. (1992). Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang, dan Sumbangannya kepada Transformasi Bangsa. In F. R. DKK (Ed.), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. PT Tiara Wacana Yogya.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Melati, N. K. (2019). *Membicarakan Feminisme*. Penerbit EA Books.
- Muchtar, Y. (2016). *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru*. Institut KAPAL Jakarta.
- Noerhadi, T. H. (1985). Panggilan Nairobi. In L. Hadiz (Ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. LP3ES.

Rahayu, R. I. (1996). Politik Gender Orde Baru (Tinjauan Organisasi Perempuan Sejak 1980-an). In L. Hadiz (Ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. LP3ES.

Ratna, N. K. (2013). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Pustaka Pelajar.

DKK, S. A. (2013). *Indonesian Women's Movement: Making Democracy Gender Responsive*. Women Research Institute.

Suryakusuma, J. (2011). *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Komunitas Bambu.